



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KARO  
NOMOR : **31** TAHUN 2025

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA KABUPATEN KARO TAHUN 2026

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KARO,

Menimbang : a. bahwa dalam perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam program pembentukan perda setiap tahun berkenaan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai dengan pasal 16 ayat (2) jo. pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo;

Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah;
7. Peraturan DPRD Kabupaten Karo Nomor : 4 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025 Nomor 10)

Memperhatikan: Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karo pada tanggal 10 November 2025

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2026 sebanyak 19 (sembilan belas) Judul Rancangan Peraturan Daerah terdiri dari :
- a. Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karo sebanyak 17 (tujuh belas) judul;
  - b. Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo sebanyak 2 (dua) judul.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kabanjahe  
Pada tanggal **10** November 2025

KETUA DPRD  
KABUPATEN KARO



IRIANI

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo  
Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Karo  
Tahun 2026

Nomor : **31** Tahun 2025  
Tanggal : 10 November 2025

Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2026

No	Judul Ranperda	Keterangan
1	Ranperda Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Karo	Usul Pemerintah Daerah
2	Ranperda Tentang Ketahanan Pangan	Usul Pemerintah Daerah
3	Ranperda Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Karo	Usul Pemerintah Daerah
4	Ranperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Penyediaan dan Pengelolaan Kawasan Pengembalaan Umum	Usul Pemerintah Daerah
5	Ranperda Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	Usul Pemerintah Daerah
6	Ranperda Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata	Usul DPRD
7	Ranperda Tentang Kuta	Usul Pemerintah Daerah
8	Ranperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Usul Pemerintah Daerah
9	Ranperda Tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah	Usul Pemerintah Daerah
10	Ranperda Tentang Pengendalian Dan Penanggulangan Rabies di Kabupaten Karo	Usul Pemerintah Daerah
11	Ranperda Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa	Usul Pemerintah Daerah
12	Ranperda Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2025 Tentang Pemilihan Kepala Desa	Usul Pemerintah Daerah
13	Ranperda Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	Usul Pemerintah Daerah
14	Ranperda Tentang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif	Usul Pemerintah Daerah

15	Ranperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karo Tahun 2022-2042	Usul Pemerintah Daerah
16	Ranperda Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027	Usul Pemerintah Daerah
17	Ranperda Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Usul Pemerintah Daerah
18	Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025	Usul Pemerintah Daerah
19	Ranperda Tentang Penyelenggaraan Perkoperasian	Usul DPRD

KETUA DPRD  
KABUPATEN KARO



IRIANI